

2022



**DINAS PERHUBUNGAN** 





dishubmadiunkab@gmail.com



KABUPATEN MADIUN



# PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN DINAS PERHUBUNGAN

Jalan Raya Panglima Sudirman No. 50 Telp/Fax (0351)383903/388293 surel: dishubmadiunkab@gmail.com

# MEJAYAN

# KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN MADIUN

NOMOR: 188.45/08/KPTS/402.108/ 2022

**TENTANG** 

# PENETAPAN RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2022 DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN MADIUN

#### Menimbang :

- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 85 ayat (2) dan Pasal 89 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, adanya kewajiban bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah serta berpedoman pada Rencana Strategi Dinas dan bersifat indikatif;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a , maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Informatika dan Komunikasi Kabupaten Madiun.

# Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 2003 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
   Pembangunan Nasional;
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Permendagri No. 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan, tatacara penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah.
- 8. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah kabupaten Madiun Tahun 2018 2023;
- 9. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Madiun;
- Peraturan Bupati Nomor 62 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2016 kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Madiun.

## **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan:

KESATU :

: Menetapkan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan Kabupaten Madiun Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini ;

KEDUA

: Rencana Kerja (Renja) sebagaimana dalam diktum KESATU menjadi pedoman bagi Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bidang, Kepala Sub Bagian dan staf pada Dinas Perhubungan Kabupaten Madiun;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan ;

KEEMPAT : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, maka akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Madiun

pada tanggal

Januari 2022

EPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN MADIUN

**SUPRIVADI, AP, M.Si**Pembina Utama Muda
NIP. 19740610 199311 1 002

TEMBUSAN: Keputusan ini disampaikan kepada:

Yth. 1. Sekretaris Daerah Kabupaten Madiun.

- 2. Sekretaris Dishub Kab. Madiun;
- 3. Kepala Bidang pada Dishub Kab. Madiun;
- 4. Arsip.

### **BABI**

#### **PENDAHULUAN**

#### 1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Undang-Undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah telah mewajibkan setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) SKPD sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun, dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Renstra SKPD ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Sebagai sebuah dokumen resmi SKPD, Renja Dinas Perhubungan mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah (RPJMD) daerah dan Renstra SKPD yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah. Renja Dinas Perhubungan disusun secara terpadu, partisipatif dan demokratis. Renja tersebut digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kaupaten Madiun dan sebagai dasar pengusulan program/kegiatan yang akan dibiayai APBD Propinsi Jawa Timur dan APBN.

Dokumen Renja Dinas Perhubungan pada dasarnya merupakan suatu proses pemikiran strategis untuk menyikapi isu-isu yang berkembang dan mengimplementasikannya dalam program dan kegiatan. Kualitas dokumen Renja sangat ditentukan oleh kualitas program dan kegiatan yang akan dilaksanakan, sehingga penyusunan Renja Dinas Perhubungan sangat ditentukan oleh kemampuan Dinas dalam menyusun, mengorganisasikan, mengimplementasikan, mengendalikan dan mengevaluasi capaian program dan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi.

Berdasarkan Permendagri No.54 Tahun 2010 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah, proses penyusunan Renja SKPD terdiri dari tiga tahapan utama yaitu tahap persiapan penyusunan, tahap penyusunan rancangan, dan tahap penetapan renja SKPD. Tahapan persiapan meliputi pembentukan tim penyusun RKPD dan Renja SKPD, orientasi mengenai RKPD dan Renja SKPD, penyusunan agenda kerja, serta penyiapan data dan informasi. Penyusunan rancangan Renja SKPD merupakan tahapan awal yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen Renja SKPD yang definitif.

Dalam prosesnya, penyusunan rancangan Renja Dinas Perhubungan mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD. Oleh karena itu penyusunan rancangan Renja Dinas Perhubungan dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan rancangan awal RKPD, dengan focus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting Dinas, evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Perhubungan tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Dinas Perhubungan. Tahap penetapan rancangan akhir Rencana Kerja Dinas Perhubungan dilakukan dengan pengesahan oleh Kepala Daerah, selanjutnya Kepala Dinas menetapkan Renja Dinas Perhubungan untuk menjadi pedoman di lingkungan Dinas dalam menyusun program dan kegiatan prioritas Dinas pada tahun anggaran berkenaan.

#### 1.2. Landasan Hukum

Landasan Hukum Penyusunan Renja Dinas Perhubungan adalah:

- 1) Undang-Undang Nomor 58 Tahun 2003 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- 3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- 4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 7) Permendagri No. 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan, tatacara penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah.
- 8) Peraturan Daerah Nomor 15 tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2005 2025;
- 9) Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2018 2023;
- 10) Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Sususan
   Perangkat Daerah Kabupaten Madiun dirubah Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 13
   Tahun 2019 Tentang Perubahan Pembentukan Dan Sususan Perangkat Daerah Kabupaten Madiun;
- 11) Peraturan Bupati Madiun Nomor 44 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Madiun dirubah Peraturan Bupati Madiun Nomor 62 tahun 2019 tentang Perubahan Kedudukan, Susunan organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Madiun.

#### 1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan penyusunan Renja Dinas Perhubungan adalah:

- 1) Meningkatkan Sarana Prasarana dan Kelengkapan Jalan Yang Berkeselamatan
- Sebagai dokumen pelaksanaan program dan kegiatan yang berpedoman pada RKPD Kabupaten Madiun.

#### 1.4. Sistematika Penulisan

#### **BAB I PENDAHULUAN**

#### 1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Dinas Perhubungan, proses penyusunan Renja, keterkaitan antara Renja dengan dokumen RKPD, Renstra Dinas Perhubungan, dengan Renja K/L dan Renja provinsi/Kabupaten/kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

#### 1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Dinas Perhubungan, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Dinas.

#### 1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Dinas Perhubungan.

#### 1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Dinas Perhubungan, serta susunan garis besar isi.

#### BAB II

#### EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PERHUBUNGAN TAHUN LALU

#### 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Perhubungan Tahun Lalu

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Perhubungan tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Dinas Perhubungan sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Dinas Perhubungan berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Dinas Perhubungan tahun-tahun sebelumnya.

#### 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan.

Berisi kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Dinas Perhubungan berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007. Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi Dinas, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

# 2.3 Isu – isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Subbab ini berisi uraian mengenai :

- 1. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Dinas Perhubungan dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Dinas;
- 2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan;
- 3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/global, seperti SPM dan MDGs (*Millenium Development Goals*);
- 4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Dinas Perhubungan dan
- 5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program prioritas tahun rencana.

#### 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Sub-bab ini berisikan uraian mengenai:

- 1. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;
- 2. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;
- 3. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD, misalnya: terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarannya berbeda.

#### **BAB III**

#### TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN

#### 3.1 Telaahan terhadap kebijakan nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan

#### 3.2 Tujuan dan sasaran Renja Dinas Perhubungan

Subbab ini berisi perumusan tujuan dan sasaran yang didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Dinas Perhubungan .

#### 3.3 Program dan Kegiatan Tahun 2022

Berisikan penjelasan mengenai:

- a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan. Misal: Pencapaian visi dan misi kepala daerah, Pencapaian MDGs, Pengentasan kemiskinan, Pencapaian SPM, Pendayagunaan potensi ekonomi daerah, Pengembangan daerah terisolir, dsb.
- b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, yang meliputi:
  - 1. Jumlah program dan jumlah kegiatan.
  - 2. Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan

(apa saja yang tersebar ke berbagai kawasan dan apa saja yang terfokus pada kawasan atau kelompok masyarakat tertentu).

## **BAB IV**

# Penutup

Merupakan uraian tentang capaian kinerja dari Dinas Perhubungan selama tahun 2021, berikut ulasan langkah yang telah dilakukan dan upaya perbaikan ke depan.

#### **BABII**

#### EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

#### 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Perhubungan Tahun 2021

Pada Tahun 2021 total anggaran Dinas Perhubungan Kabupaten sebesar Mengacu pada Program dan Kegiatan di Dinas Perhubungan maka Pencapaian Realisasi Fisik Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

1). Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, realisasi keuangan 82,71 % sedangkan realisasi fisik 100%.

Indikator programnya adalah: Tersedianya Program Penunjang Urusan Pemerintahan daerah Kabupaten/Kota. Proporsi capaian program berdasarkan realisasi dibandingkan target sebesar 100 %.

Program tersebut dilaksanakan dengan kegiatan sebagai berikut:

- Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Anggaran sebesar Rp. 265.584.286, realisasi sebesar Rp. 248.055.844,- (93,40 %). Indikator kegiatan Prosentase Administrasi Umum Prangkat Daerah yang terpenuhi realisasi dibanding target sebesar 100%
- Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Anggaran sebesar Rp. 210.518.182,- realisasi sebesar Rp. 30.250.000 (14.37%). Indikator kegiatan Tersedianya Pengadaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, realisasi dibanding target sebesar 100%
- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Anggaran sebesar Rp. 475.618.523,- realisasi sebesar Rp. 455.897.850,- (95.85%). Indikator kegiatan Prosentase Jasa Penunjang urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi, realisasi dibanding target sebesar 100% Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah anggaran sebesar Rp. 361.202.050,- realisasi sebesar Rp. 363.381.220,- (97.39%). Indikator kegiatan Tersedianya

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, realisasi dibanding target sebesar 100%

2). Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, realisasi keuangan 93.65% sedangkan realisasi fisik 100%.

Indikator programnya adalah:

- a. Prosentase Sarana Prasarana dan Perlengkapan yang berfungsi baik. Proporsi capaian program berdasarkan realisasi dibandingkan target sebesar 100 %.
- b. Prosentase Kendaraan laik Jalan. Proporsi capaian program berdasarkan realisasi dibandingkan target sebesar 106%.
- c. Prosentase Angka Tertib Lalu Lintas. Proporsi capaian program berdasarkan realisasi dibandingkan target sebesar 98%

Program tersebut dilaksanakan dengan kegiatan sebagai berikut:

- Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten Kota, anggaran sebesar Rp.257.813.210, - realisasi sebesar Rp. 234.506.800,- (90,96 %) Indikator kegiatan Prosentase Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten Kota, realisasi dibandingkan target sebesar 100 %
- Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota, anggaran sebesar Rp. 242.271.070,- realisasi sebesar Rp. 211.410.530,- (87,26%) Indikator kegiatan Prosentase sarana prasarana dan perlengkapan jalan yang berkeselamatan, realisasi dibandingkan target sebesar 100 %
- Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir, anggaran sebesar Rp. 634.560.350, - realisasi sebesar Rp. 602.997.780, - (95,03 %) Indikator kegiatan Prosentase penerbitan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir, realisasi dibandingkan target sebesar 100 %
- Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor, anggaran sebesar Rp. 581.183.473,realisasi sebesar Rp. 509.817.215 (87,72%) Indikator kegiatan Prosentase Pengujian berkala kendaraan Bermotor, realisasi dibandingkan target sebesar 106%.
- Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota, anggaran sebesar Rp. 15.562.096.497,- realisasi sebesar Rp. 14.626.086.752,- (93,99%)

- Indikator Kegiatan Prosentase Manajemen Dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota. Realisasi dibandingkan target sebesar 98%.
- Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota, anggaran sebesar Rp.30.371.000,realisasi sebesar Rp.25.230.000,- (83.07%).

Indikator Kegiatan Prosentase Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) Untuk Jalan Kabupaten/Kota. Realisasi dibandingkan target sebesar 100%.

#### 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Madiun

Dinas Perhubungan Kabupaten Madiun sebagai lembaga teknis yang menangani pelayanan di bidang perhubungan, dituntut untuk mampu berperan sebagai subjek perencana dan pelaksana pelayanan bidang transportasi dan keselamatan lalu lintas yang profesional, handal dan berdaya saing, misalnya Pelayanan pengujian Kendaraan bermotor serta memberikan wawasan dan pengetahuan tentang berlalu lintas yang baik dan benar. Serta Pelayanan kepada masyarakat untuk keselamatan dan perlengkapan jalan.

Untuk mencapai visi dan misi Dinas Kabupaten Madiun melaksanakan program kerja strategis 5 (lima) tahunan sebagai strategi dan kebijakan yang ditetapkan dalam core strategy dan core policy dan diwujudkan dalam beberapa program. Program yang akan dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Madiun adalah merupakan strategi pada tingkat kebijakan. Strategi berupa pelaksanaan program dapat dikatakan berhasil jika implementasi program tersebut sesuai dengan visi dan misi yang diemban. Sehingga adanya keterkaitan antara program Dinas Perhubungan Kabupaten Madiun dengan program tingkat Kabupaten Madiun menjadi mutlak.

Pelayanan bidang perhubungan disini adalah memberikan pelayanan jasa transportasi darat yang aman, lancar dan terjangkau untuk mewujudkan suatu kondisi lalu lintas yang tertib disertai dengan sarana prasarana transportasi yang memadai.. Adapun kinerja pelayanan yang telah dilakukan oleh Dinas Perhubungan sebagai berikut :

- Penyelenggaraan pelayanan administrasi perkantoran yang cepat dan profesional.
- Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB). 2.
- Pelayanan ijin trayek angkutan dan ijin usaha. 3.
- Peningkatan pelayanan di bidang angkutan orang melalui pemilihan, pembinaan dan pemberian penghargaan kepada sopir/abdiyasa kendaraan teladan.
- Pengatuaran, Pengawalan, penegakan disiplin melalui kegiatan PAM Lalu lintas, PAM lebaran, natal dan tahun baru, pelayanan pengawalan bupati dan forpimda

- Pemeliharaan rambu-rambu guna meningkatkan keselamatan pengguna jalan dan ketertiban lalu lintas.
- 7. Pengadaan perlengkapan keselamatan jalan, melalui pengadaan rambu-rambu, marka jalan, traffic light dan warning light.
- Meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pemungutan retribusi bidang perhubungan salah satunya dengan melaksanakan parkir berlangganan dan pelayanan pengujian kendaraan bermotor
- Pelayanan memberikan rekomendasi Analisis Dampak Lalu Lintas ( ANDALALIN )
- 10. Pelayanan keselamatan dan perlengkapan jalan ( Pemasangan, Pemeliaharaan Rambu Lalu Lintas dan Penerangan Jalan Umum/PJU).
- 11. Perencanaan Kerjasama Pemerintah Daerah Dengan Badan Usaha (KPDBU)

Dengan memperhatikan kinerja pelayanan yang telah diberikan oleh Dinas Perhubungan ada beberapa hal yang perlu dicermati yaitu terkait keberhasilan dan kegagalan pelayanan dimaksud. Secara umum kinerja pelayanan Dinas Perhubungan mencapai keberhasilan, hal ini ditunjukkan dari beberapa pelayanan yang pencapaiannya telah sesuai dengan target yang direncanakan. Namun ada beberapa pelayanan yang pencapaiannya tidak sesuai rencana, yaitu pelayanan ijin trayek yang dari tahun ke tahun mengalami penurunan jumlah kendaraan, hal ini dikarenakan angkutan umum pada saat ini kurang diminati karena banyaknya kendaraan pribadi yang lebih mudah dan murah untuk digunakan. Permasalahan pengadaan perlengkapan keselamatan jalan dalam hal ini pengadaan rambu-rambu juga harus diperhatikan. Dengan kondisi geografis Kabupaten Madiun yang luas, tentunya membutuhkan perlengkapan keselamatan jalan dalam jumlah besar dan berbagai jenis sesuai kondisi dan kebutuhan di lapangan. Hal ini tentunya membutuhkan penganggaran yang cukup besar guna mendukung pengadaan perlengkapan keselamatan jalan yang dimaksud. Sedangkan untuk Sumber Daya Manusia bidang perhubungan, masih dibutuhkan tenaga yang memiliki kemampuan dan kompetensi sesuai standar yang ada. Hal ini tentunya harus disikapi dengan mengadakan pendidikan dan pelatihan sesuai bidang yang dibutuhkan guna meningkatkan profesionalisme pelayanan perhubungan.

Selama pelaksanaan otonomi daerah pada umumnya kualitas penyelenggaraan pelayanan perhubungan Kabupaten Madiun mengalami peningkatan. Beberapa indikator yang memperlihatkan adanya peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan bidang perhubungan meliputi:

- 1. Pelayanan di bidang Perhubungan antara lain :
  - a. Meningkatnya sarana prasarana keselamatan jalan, berupa peningkatan ketersediaan rambu-rambu lalu lintas dan perlengkapan jalan lainnya,

- b. Meningkatnya Kendaraan laik jalan, dengan meningkatnya kendaraan wajib uji di wilayah Kabupaten Madiun.
- c. Meningkatnya angka tertib lalu lintas dengan meningkatnya angka tertib lalu lintas diwilayah Kabupaten madiun

Peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan perhubungan dan belum secara signifikan diikuti oleh peningkatan kualitas pelayanan di lapangan. Hal ini disebabkan adanya beberapa tantangan dan permasalahan pokok antara lain:

- 1. Belum adanya sinkronisasi, koordinasi dan sinergi yang baik antara beberapa stakeholder terkait dalam penyelenggaraan pelayanan transportasi dan keselamatan lalu lintas, sehingga menimbulkan keterbatasan dalam pelaksanaan di lapangan;
- 2. Masih kurangnya SDM yang memiliki skill dan kompetensi sesuai dengan tugas dan kewajiban utamanya, khususnya tenaga teknis perhubungan dan teknis Informatika.
- 3. Belum adanya sistem informasi perhubungan yang terpadu sehingga data dan informasi penting yang mendukung proses perencanaan dan pengadaan sarana prasarana perhubungan belum terkelola dengan baik;
- 4. Kebijakan Pemerintah yang belum mendukung terbentuknya jabatan fungsional di Bidang Perhubungan pada Pemerintah Kabupaten Madiun;
- 5. Belum optimalnya alokasi anggaran untuk pengembangan SDM.
- 6. Masih berkurangnya anggaran untuk memenuhi pelayanan kepada masayarakat dikarenakan luas wilayah Kabupaten Madiun tidak sebanding dengan jumlah anggaran yang ada.

Dalam perkembangan Dinas Perhubungan Kabupaten Madiun kedepan, dengan mengoptimalkan pemanfaatan potensi yang dimiliki, Dinas Perhubungan Kabupaten Madiun diharapkan responsif, kreatif dan inovatif agar mampu menjawab perubahan lingkungan dan tantangan untuk mewujudkan pelayanan perhubungan dan pelayanan informatika komunikasi yang berkualitas. Berikut ini Tabel mengenai pencapaian kinerja pelayanan Dinas Perhubungan berdasarkan indikator kinerja yang dituangkan dalam Rencana Strategis Dinas Perhubungan dan Indikator Kinerja Utama:

#### Tabel 2.1

# PENETAPAN TARGET CAPAIAN KINERJA DINAS PERHUBUNGAN

VISI KAB. Madiun : Mewujudkan Kabupaten Madiun yang Aman, Mandiri, Sejahtera, dan Berakhlak

MISI 3 : Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Yang Mandiri Berbasisi Agrobisnis, Argoindustri dan Pariwisata yang berkelanjutan

I. TUJUAN RPJMD : Meningkatnya Daya Saing Ekonomi Inklusif, Mandiri, dan Berkelanjutan

II. INDIKATOR TUJUAN : Angka Pertumbuhan Ekonomi

SASARAN RPJMD : Meningkat nya sarana dan prasarana infrastruk tur perekonomian

INDIKATOR SASARAN : Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur

#### III. **TUJUAN OPD** : Meningkatnya Pelayanan Perhubungan yang berkualitas

INDIKATOR TUJUAN	RUMUS	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Indeks jalan berkeselamatan	Prosentase sarana prasarana dan perlengkapan jalan yang berkeselamatan+Prosentase Manajemen Perhubungan Yang baik 2 X 100%				60%	70%	80%

#### SASARAN OPD : Meningkatkan Infrastruktur dan Manajemen Perhubungan

INDIKATOR SASARAN	RUMUS	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Persentase sarana prasarana dan perlengkapan jalan yang berkeselamatan	Jumlah sarana prasarana dan perlengkapan yang tersedia x 100 % Jumlah sarana prasarana dan Perlengkapan keseluruhan				65%	75%	90%
2. Prosentase Manajemen Perhubungan yang Baik	Rata – rata Prosentase Pelaksanaan Manajemen Perhubungan				95%	95%	100%

INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME)	RUMUS	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Prosentase Sarana Prasarana dan Perlengkapan Jalan yan berfungsi baik	Jumlah Fasilitas perhubungan yang berfungsi baik x 100% Jumlah perlengkapan jalan yang terpasang				75%	85%	95%
2. Prosentase Kendaraan Laik Jalan	Jumlah Kendaraan Lulus uji x 100% Jumlah seluruh Kendaraan wajib uji				90%	90%	100%
3. Prosentase Angka tertib Lalu Lintas	Jumlah kendaraan yang tertib lalu lintas x 100% Jumlah kendaraan yang diperiksa				65 %	78%	90%

#### 2.3. Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan

Dalam melaksanakan tugasnya, Dinas Kabupaten Madiun mempunyai kewenangan yang telah diatur dalam Peraturan Bupati Madiun Nomor 44 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Madiun dirubah Peraturan Bupati Madiun Nomor 62 tahun 2019 tentang Perubahan Kedudukan, Susunan organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Madiun. sebagai berikut:

#### 1. Tugas Pokok Dinas Perhubungan:

Melaksanakan urusan Rumah Tangga Pemerintah Daerah dalam bidang Perhubungan, serta bidang Ketenagalistrikan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

#### 2. Fungsi Dinas Perhubungan:

Fungsi ini meliputi perencanaan, pelaksanaan, pembinaan, pengawasan administrasi dan koordinasi.

- Perencanaan segala kegiatan yang berupa pengumpulan data, pengelolaan, penilaian ( Evaluasi ) dan perencanaan untuk pelaksanaan tugas.
- Pelaksanaan berupa tindakan atau usaha untuk melaksanakan kebijaksanaan yang sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.
- Pembinaan adalah usaha ke arah peningkatan pada transportasi yang aman, lancar dan terjangkau.
- Pengawasan atau pengendalian serta evaluasi terhadap pelaksanaan tugas pokok sesuai Peraturan Perundangan yang berlaku.
- Administrasi merupakan usaha atau kegiatan dibidang ketatausahaan, kepegawaian, perlengkapan, keuangan, serta pelaporan.
- Koordinasi segala usaha untuk mengadakan kerjasama dengan instansi terkait demi kelancaran tugas Dinas Perhubungan.

Adapun isu-isu strategis yang dihadapi Dinas Perhubungan Kabupaten Madiun adalah sebagai berikut :

- Perpindahan Pusat Pemerintahan Kabupaten Madiun di Kecamatan Mejayan, yang ditandai dengan peningkatan pembangunan gedung dan infrastruktur lainnya yang menimbulkan dampak perubahan pola pergerakan dan kebutuhan ruang lalu lintas yang ada, sehingga dibutuhkan kebijakan yang mengatur secara efektif dan efisien;
- 2. Perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat sehingga menuntut perkembangan teknologi transportasi dan pelayanan perhubungan yang terpadu
- 3. Tuntutan penyediaan pelayanan prima kepada masyarakat, sesuai dengan Tugas dan Fungsi Perhubungan salah satunya adalah pelayanan angkutan umum, yang meliputi penyediaan angkutan umum yang memadai dan pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) yang profesional;
- 4. Wilayah Kabupaten Madiun yang luas dan kaya akan potensi daerah, baik potensi alam maupun sosial budaya yang ada, membutuhkan sarana prasarana transportasi yang memadai guna mendukung prioritas pembangunan yang telah diprogramkan.

#### 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Kabupaten Madiun menetapkan prioritas pembangunan untuk tahun 2018 -2023 adalah sebagai berikut :

- 1. Pertanian
- 2. Pendidikan
- 3. Kesehatan
- 4. Ketenagakerjaan
- 5. Keamanan
- 6. Lingkungan Hidup

Selain prioritas pembangunan tersebut Pemerintah Kabupaten Madiun juga menekankan pada prioritas penanganan program (penekanan kebijakan) antara lain :

- 1. Perekonomian, yang mengutamakan pengembangan agrobisnis, pariwisata dan bangunan pusat ekonomi lainnya;
- 2. Infrastruktur, yang fokus pada peningkatan pembangunan Jalan dan Jembatan, Pusat Pemerintahan, Waduk, Jalan Tol;
- Peningkatan PAD, bagi Dinas penghasil agar dapat mengupayakan Intensifikasi dan Eksentifikasi Pendapatan;
- 4. Reformasi Birokrasi, dimana ada 8 area perubahan yaitu Organisasi, Tatalaksana, Peraturan Perundang-undangan, SDM Aparatur, Pengawasan, Akuntabilitas, Pelayanan Publik, *Mind Set* dan *Cultural Set* Aparatur)
- 5. Pendekatan pembangunan berdasarkan asas pemerataan yang diwujudkan melalui Sub Satuan Wilayah Pengembangan (SSWP).

Masing-masing prioritas program pembangunan daerah mendukung capaian target dan sasaran RPJMD Kabupaten Madiun Tahun 2018-2023. Capaian kinerja yang ingin diwujudkan dalam pelaksanaan prioritas program pembangunan tahun 2022 adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.2** Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Madiun **Tahun 2022** 

NO	Indikator Program		Target Rens	tra SKPD				Realisasi	Capaian	Catatan Analisis
		Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020	2021	
	URUSAN PERHUBUNGAN									
1	Prosentase Sarana Prasrana dan Perlengkapan yang berkeselamatan	40%	55%	65%	65%	75%	90%	90%	100%	
2	Prosentase Kendaraan Laik Jalan	90%	90%	90%	90%	90%	100%	80%	101.67%	
3	Prosentase Angka Tertib Lalu Lintas	67%	80%	83%	65%	78%	90%	105%	98.46%	

Tabel 2.3 Rancangan Awal Renstra Dinas Perhubungan **Kabupaten Madiun Tahun 2021** 

SASARAN OPD	INDIKATOR	TARGET 2022	PROGRAM	SKPD PELAKSANA
1	2	3	4	5
Meningkatkan infrastruktur dan Manajemen Perhubungan	Prosentase Sarana Prasrana dan     Perlengkapan Jalan Yang     Berkeselamatan     Prosentase Manajemen     Perhubungan yang baik	75% 95%	<ul> <li>Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)</li> <li>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</li> </ul>	Dishub Dishub

Berdasarkan Sasaran RKPD yang ditetapkan dalam dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2022, Dinas Perhubungan Sasaran Renstra yang mendukung prioritas RKPD

Tabel 2.4 Sasaran Renstra Dinas Perhubungan **Tahun 2021** dengan Prioritas RKPD Kabupaten Madiun 2021

No.	Sasaran Renst	ra Dinas Perhub	ungan	Sasaran RKPD
1		2		3
1	Meningkatkan	infrastruktur	dan	Meningkat nya sarana dan prasarana
	Manajemen Perh	ubungan		infrastruk tur perekonomian

Tabel 2.5
Target Kinerja Sasaran Tahun 2022 Dinas Perhubungan Kabupaten Madiun

NT.	The base of	G	L. 19. A. G. C. C.	Targe	et Kinerja Sasaran
No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	2022	2023
<b>(1)</b>	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Meningkatnya Pelayanan Perhubung yang berkualitas	n Meningkatkan infrastruktur dan Manajemen Perhubungan	Prosentase Sarana Prasrana dan Perlengkapan Jalan Yang Berkeselamatan	75%	90%
			Prosentase Manajemen Perhubungan yang baik	95%	100%

### **BABIII**

# TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

#### 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

#### Dari Kementerian Perhubungan

Rencana Strategis Kementerian Perhubungan 2019-2024 mengusung visi:

#### "KESELAMATAN JALAN TANGGUNG JAWAB KITA BERSAMA."

Yang dijabarkan ke dalam 3 (tiga) misi:

- 1. Peningkatan pelayanan Keselamatan Transportasi dan Kelengkapan Sarana Prasrana Jalan mendukung Keselamatan.
- 2. Peningkatan penyelenggaraan penelitian, pengembangan dan penerapan IPTEK dalam rangka pengembangan teknologi transportasi yang ramah lingkungan dan Berkeselamatan.
- 3. Peningkatan profesionalisme sumber daya manusia dan restrukturisasi/reformasi kelembagaan dan regulasi.

#### Isu Strategis Bidang Perhubungan:

Salah satu program Agenda Prioritas Pembangunan (Nawa Cita) yaitu meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional dijabarkan kembali ke dalam agenda pembangunan nasional, khususnya agenda pembangunan transportasi nasional, diantaranya adalah membangun konektivitas nasional untuk mencapai keseimbangan pembangunan dan membangun transportasi massal perkotaan.

# Isu Strategis 1 : Membangun Konektivitas Nasional untuk mencapai keseimbangan pembangunan.

Infrastruktur penunjang konektivitas nasional baik berupa jaringan transportasi dan jaringan telekomunikasi, perlu diintegrasikan dengan pelayanan sarana intermoda transportasi yang terhubung secara efisien dan efektif, termasuk mendorong pembangunan konektivitas antar wilayah, sehingga dapat mempercepat dan memperluas pembangunan ekonomi Indonesia. Penyediaan infrastruktur transportasi dan telekomunikasi yang mendorong konektivitas akan menurunkan biaya transportasi dan biaya logistik, sehingga dapat meningkatkan daya saing produk, dan mempercepat gerak ekonomi.

Kebijakan strategis untuk mewujudkan konektivitas nasional adalah:

1. Mempercepat pembangunan sistem transportasi multimoda;

- 2. Mempercepat pembangunan transportasi yang mendorong penguatan industri nasional untuk mendukung Sistem Logistik Nasional dan penguatan konektivitas nasional dalam kerangka mendukung kerjasama regional dan global;
- 3. Menjaga keseimbangan antara transportasi yang berorientasi nasional dengan transportasi yang berorientasi lokal dan kewilayahan;
- 4. Membangun sistem dan jaringan transportasi yang terintegrasi untuk mendukung investasi pada Koridor Ekonomi, Kawasan Industri Khusus, Kompleks Industri, dan pusat-pusat pertumbuhan lainnya di wilayah non-koridor ekonomi;
- 5. Mengembangkan sarana dan prasarana transportasi yang ramah lingkungan dan mempertimbangkan daya dukung lingkungan melalui mitigasi dan adaptasi perubahan iklim maupun peningkatan keselamatan dan kualitas kondisi lingkungan;
- 6. Meningkatkan keselamatan dan keamanan dalam penyelenggaraan pelayanan transportasi serta pertolongan dan penyelamatan korban kecelakaan transportasi;
- 7. Meningkatkan kapasitas dan kualitas lembaga pengembangan sumber daya manusia.

#### Isu Strategis 2 : MembangunTransportasi Umum Massal Perkotaan.

Pembangunan perkotaan Indonesia kedepan diarahkan pada peningkatan peran perkotaan sebagai basis pembangunan dan kehidupan yang layak huni, berkeadilan, mandiri, berdaya saing, dan berkelanjutan, sesuai dengan karakter potensi dan budaya lokal. Arah kebijakan pembangunan perkotaan pada berfokus pada pengembangan kota sebagai suatu kesatuan kawasan/wilayah, yaitu kota sebagai pendorong pertumbuhan nasional dan regional serta kota sebagai tempat tinggal yang berorientasi pada kebutuhan penduduk kota. Walaupun demikian, pembangunan perkotaan ke depan akan lebih difokuskan pada pelaksanaan pengendalian pembangunan kota-kota besar dan metropolitan serta percepatan pembangunan kota-kota menengah dan kecil. Oleh karena itu, dalam rangka mengembangkan transportasi umum massal perkotaan, pembangunan sistem angkutan umum modern yang saling terintegrasi seperti BRT dan MRT diharapkan dapat meningkatkan peran angkutan umum dalam melayani kebutuhan perjalanan penduduk perkotaan serta menciptakan transportasi perkotaan yang praktis, efisien, ramah lingkungan, dan berkeadaban. Arah kebijakan dan strategi yang disusun lima tahun kedepan adalah:

- 1. Mengembangkan sistem angkutan umum massal yang modern dan maju dengan orientasi kepada bus maupun rel serta dilengkapi dengan fasilitas alih moda terpadu;
- 2. Mengembangkan manajemen transportasi perkotaan yang berimbang dengan memperhatikan interaksi antara transportasi dan tata guna lahan;
- 3. Meningkatkan integrasi kelembagaan transportasi perkotaan.

Arah kebijakan dan strategi Kementerian Perhubungan Tahun 2015-2019 dikelompokkan menjadi 3 aspek, meliputi keselamatan dan keamanan, pelayanan, serta kapasitas transportasi.

#### 1. Keselamatan dan Keamanan

Keselamatan dan keamanan dalam penyelengaraan pelayanan transportasi ditujukan untuk meningkatkan rasa aman dan nyaman pengguna transportasi serta menurunkan jumlah dan tingkat kecelakaan transportasi yang meliputi transportasi jalan, kereta api, pelayaran, dan penerbangan. Tingkat keselamatan dan keamanan transportasi diwujudkan melalui dua sasaran yaitu menurunnya angka kecelakaan transportasi, dan menurunnya jumlah gangguan keamanan dalam penyelenggaraan transportasi.

#### 2. Pelayanan Transportasi

Dalam rangka meningkatkan pelayanan transportasi ditetapkan 7 sasaran, yaitu:

- (1) Meningkatnya kinerja pelayanan sarana dan prasarana transportasi,
- (2) Terpenuhinya SDM transportasi dalam jumlah & kompetensi sesuai dengan kebutuhan,
- (3) Meningkatnya kualitas penelitian sesuai dengan kebutuhan,
- (4) Meningkatnya kinerja Kementerian Perhubungan dalam mewujudkan good governance,
- (5) Meningkatnya penetapan dan kualitas regulasi dalam implementasi kebijakan bidang perhubungan,
- (6) Menurunnya emisi gas rumah kaca (RAN-GRK) dan meningkatnya penerapan teknologi ramah lingkungan pada sektor tansportasi, dan
- (7) Meningkatnya kualitas kinerja pengawasan dalam rangka mewujudkan clean governance.

#### 3. Kapasitas Transportasi

Dalam rangka meningkatkan kapasitas transportasi, Kementerian Perhubungan menetapkan 5 (lima) sasaran, yaitu:

- (1) Meningkatnya kapasitas sarana dan prasarana transportasi dan keterpaduan sistem transportasi antarmoda dan multimoda
- (2) Meningkatnya produksi angkutan penumpang dan barang,
- (3) Meningkatnya layanan transportasi di daerah rawan bencana, perbatasan, terluar, terpencil dan khususnya di wilayah timur Indonesia,
- (4) Meningkatnya pelayanan angkutan umum massal perkotaan, dan
- (5) Meningkatnya aplikasi teknologi informasi dan skema sistem manajemen transportasi perkotaan.

#### Arah Kebijakan Umum Perhubungan Darat 2015–2019

Arah Kebijakan Pengembangan Transportasi Darat untuk Tahun 2015-2019 disesuaikan dengan Arah dan Kebijakan RPJMN Tahun 2015-2019, Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Perhubungan Tahun 2015-2019 serta dengan mempertimbangkan perkembangan kondisi perkembangan lingkungan dan isu-isu strategis yang ada, maka secara umum Arah dan kebijakan pengembangan transportasi darat dalam 5 (lima) tahun ke depan adalah sebagai berikut:

- 1. Pembangunan dan perluasan jaringan Transportasi Darat serta meningkatkan kualitas pelayanan Transportasi Darat yang dapat menjangkau hingga ke daerah terpencil sebagai upaya untuk mewujudkan konektivitas Nasional;
- Tersedianya Infrastruktur transportasi darat yang memadai, handal dan dapat beroperasi secara efisien sebagai upaya mewujudkan pembangunan transportasi pendukung Sistem Logistik Nasional (Transportasi Multimoda);
- 3. Peningkatan efisiensi energi di bidang Transportasi Darat sebagai Upaya untuk mendukung sistem transportasi yang berkelanjutan;
- 4. Integrasi dan Revitalisasi Transportasi Perkotaan;
- 5. Memaksimalkan Rencana Umum Nasional Keselamatan (RUNK) Jalan sebagai Upaya untuk meningkatkan Keselamatan Transportasi Darat;
- 6. Melaksanakan kegiatan administrasi Direktorat Jenderal Perhubungan Darat untuk mendorong upaya reformasi birokrasi, reformasi regulasi, dan restrukturisasi kelembagaan di bidang Transportasi Darat.

#### 3.2. Tujuan Dan Sasaran Renja Dinas Perhubungan

Isu-isu strategis dapat berasal dari skala lokal, regional maupun nasional. Sesuai Peraturan Bupati Madiun No. 44 tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja dinas perhubungan kabupaten madiun, bahwa Dinas Perhubungan bertanggung jawab atas pelaksanaan otonomi daerah pada bidang urusan perhubungan, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun peraturan perundangan yang mengatur urusan perhubungan adalah UU Nomor 14 Tahun 1992 yang telah diubah menjadi UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Perubahan UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tersebut mengakibatkan perubahan kewenangan yang sangat mendasar.

Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode 2018-2023 menuangkan program pembangunan yang akan dilaksanakan dalam visi dan misi yang hendak diwujudkan dalam 5 (lima) tahun ke depan. AdapunVisi yang telah ditetapkan adalah

# " TERWUJUDNYA KABUPATEN MADIUN YANG AMAN, MANDIRI, SEJAHTERA DAN BERAKHLAK".

Selanjutya dijabarkan dalam 5 (Lima) misi yaitu:

- 1. Mewujudkan Rasa Aman Bagi Seluruh Masyarakat dan Aparatur Pemerintah Kabupaten Madiun.
- 2. Mewujudkan Aparatur Pemerintah Yang Profesional untuk Meningkatkan Pelayanan Publik.
- 3. Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Yang Mandiri Berbasis Agrobisnis, Agro Industri dan Pariwisata Yang Berkelanjutan
- 4. Meningkatkan Kesejahteraan Yang Berkeadilan
- 5. Mewujudkan Masyarakat Berakhlak Mulia Dengan Meningkatkan Kehidupan

Dari keempat misi diatas, ada 1 (satu) misi yang terkait dengan pelayanan yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan yang diuraikan sebagai berikut:

#### Strategi dan Arah Kebijakan Misi III

Memanfaatkan Sarana Prasarana Jalan Yang Berkeselamatan dengan mendukung Pembangunan Ekonomi Berbasis Agrobisnis, Agro Industri dan Agro Wisata yang berkelanjutan .

**Tujuan OPD**: Meningkatnya Pelayanan Perhubungan Yang Berkualitas

Indikator Tujuan: Indeks Jalan Berkeselamatan

Sasaran : Meningkatkan Infrastruktur dan Manajemen Perhubungan

#### **Indikator Sasaran**:

- I. Prosentase Sarana Prasarana dan Perlengkapan Jalan Yang Berkeselamatan
- II. Prosentase Manajemen Perhubungan yang Baik

Program : Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)

#### **Indikator Program:**

- I. Prosentase Sarana Prasarana dan Perlengkapan Jalan yang Berfungsi Baik
- II. Prosentase Kendaran Laik Jalan
- III.Prosentase Angka Tertib Lalu lintas

#### 3.3. Program Dan Kegiatan Dinas Perhubungan Tahun 2022

Sasaran, indikator sasaran dan program dalam Rencana Kerja Tahun 2022 adalah Sasaran, indikator sasaran dan program yang telah ditetapkan pada Renstra, yang dipilih sesuai dengan sasaran untuk tahun yang bersangkutan. Dari uraian diatas, Dinas Perhubungan Kabupaten Madiun menetapkan sasaran, indikator sasaran dan program sebagai berikut:

#### A. SASARAN

Rencana Kerja (Renja) merupakan materi penjabaran Rencana strategis, yang berisi sasaran, program dan kegiatan selama satu tahun. Pada Tahun 2022 Dinas Perhubungan Kabupaten Madiun menetapkan Sasaran sebagai berikut : "Meningkatkan Infrastruktur dan Manajemen Perhubungan "

#### B. INDIKATOR KINERJA SASARAN

Indikator Kinerja sasaran yang dimaksud disini adalah indikator kinerja yang diukur dari masing-masing sasaran yang telah ditetapkan, dimana untuk indikator sasaran terdiri dari :

- 1. Prosentase Sarana Prasarana dan Perlengkapan Jalan Yang Berkeselamatan
  - a. Jumlah Sarana Prasarana dan Perlengkapan Yang Tersedia
  - b. Jumlah Sarana Prasarana dan Perlengkapan Keseluruhan
- 2. Prosentase Manajemen Perhubungan yang Baik
  - a. Jumlah akumulasi rata rata Pelayanan Perhubungan

#### C. PROGRAM

Untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan dituangkan dalam 2 program yaitu:

- 1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota
- 2. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)

## **BAB IV**

#### **PENUTUP**

Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Madiun Tahun 2022 merupakan pelaksanaan tahun keempat Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Madiun Tahun 2019 - 2023, berdasarkan RPJMD Kabupaten Madiun 2019 - 2023, sehingga tahun ini merupakan waktu yang tepat untuk memulai mengejar target kinerja yang akan dicapai, karena tahun-tahun pertengahan ini menjadi penentu pencapaian target-target selanjutnya.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan Kabupaten Madiun perlu disosilaisasikan kepada jajaran pimpinan, staf, dan pihak-pihak lain yang terkait dalam pelaksanaan Rencana Kerja dalam satu tahun mendatang. Dengan sosialisasi ini diharapkan semua pihak memiliki satu persepsi tentang Rencana Kerja yang telah ditetapkan sehingga pelaksanaan kegiatan yang direncanakan dapat tercapai hasilnya secara optimal, yang akhirnya tujuan dan sasaran dapat dicapai.

Namun demikian rencana pencapaian target dalam Rencana Kerja secara periodik perlu dipantau secara teratur oleh pimpinan sehingga bila terjadi perubahan asumsi yang dipergunakan dalam penetapan target/rencana dan dapat menyebabkan perubahan pencapaian dapat diatasi sedini mungkin. Selain itu evaluasi diperlukan untuk mendeteksi apakah target yang direncanakan masih relevan dengan tujuan dan sasaran yang akan dicapai.

Target kinerja bidang perhubungan yang dicantumkan dalam RPJMD berkaitan dengan Peningkatan Sarana Prasarana Keselamatan Jalan

Indikator Kinerja pelayanan perhubungan adalah:

- 1. Ketersediaan sarana prasarana keselamatan lalu lintas dan perlengkapan jalan, yang berupa halte, angkutan umum yang laik jalan, traffic light, warning light, rambu-rambu, RPPJ, marka jalan serta traffic cone. Hal ini dilakukan dengan penyediaan sarana prasarana tersebut diatas sesuai skala prioritas kebutuhan dan lokus yang ada. Ketersediaan sarana prasarana jalan yang berkeselamatan yang ada harus didukung oleh sistem data base inventarisasi dan perencanaan yang akurat dan dinamis melalui Aplikasi yang berbasis teknologi informasi yang berbasis web, melalui Aplikasi GIS (Geographic Information System).
- 2. Terselenggaranya ketertiban, kelancaran dan keamanan lalu lintas jalan sehingga mewujudkan kenyamanan dan keselamatan bagi penggunan jalan. Hal ini diupayakan dengan pelaksanaan pengamanan petugas di titik rawan laka dan rawan kemacetan. Pengamanan petugas di lokasi setiap kegiatan yang dilakukan oleh pejabat daerah. Peningkatan pemahaman ketertiban lalu lintas dari berbagai lapisan masyarakat guna mewujudkan masyarakat yang sadar lalu lintas, melalui sosialisasi

- pengemudi angkutan, sosialisasi pelajar pelopor dan sosialisasi kepada setingkat pendidikan usia dini. Yang dimaksudkan untuk mengurangi angka kecelakaan lalu lintas di Kabupaten Madiun.
- 3. Peningkatan Kendaraan Laik Jalan untuk mendukung Aksi Keselamatan dari KEMENHUB dan mendukung keselamatan sarana prasarana jalan yang berkeselamatan .. Salah satu nilai positif dari pencapaian kinerja disini adalah terwujudnya sinergitas yang baik antara beberapa stakeholder terkait melalui Forum LLAJ, sehingga ruang komunikasi dan koordinasi dapat berjalan optimal guna pelayanan perhubungan yang profesional.

Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan Sub Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan

				Indikator Kinerja				Rencana Ta	hun 20	22				Maju Rencana nun 2023
l	(ode		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Targ Program		rja Hasil egiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Tolok Ukur	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
2		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DE	NGAN P	FLAYANAN DASAR				Regiataii R	egiataii			<u> </u>	Okui	
2 15		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN								23,190,829,900				25,425,890,000
2 15	)1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH K	(ABUPAT	EN/KOTA						6,621,688,932				6,985,890,000
2 15	1 2.01			, -						5,000,000				6,000,000
		1 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Jumlah Dokumen RKA SKPD yang disusun		Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		2 Dokumen		5,000,000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			6,000,000
2 15	1 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								5,464,188,932				5,656,890,000
2 15 (	2.02	2 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah gaji dan tunjangan ASN yang terbayar		Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12 Bulan		5,459,188,932	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat			5,650,890,000
2 15 (	2.02	2 04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		Tersedianya Koordinasi dan pelaksanaan Akuntansi		Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12 Bulan		5,000,000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			6,000,000
2 15	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								70,000,000				81,000,000
2 15 (	2.05	5 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan yang diadakan		Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Paket		55,000,000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			60,000,000
2 15 (	2.05	5 05 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		Tersedianya Monitoring, evaluasi dan Penilaian kinerja Pegawai		Kab. Madiun, Semua Kecamatan,		12 Bulan			Pendapatan Asli Daerah (PAD)			6,000,000

Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan Sub Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan

	nisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan		Indikator Kinerja				Rencana	Tahun 20	22			Pra		Maju Rencana In 2023
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian	Kaluaran Suh Kagiatan	Hasil	Lokasi Output	Targ	get Capaian Kir	nerja	Pagu Indikatif	Sumber	Catatan Penting	Сар	get aian erja	Kebutuhan Dana/
		Program		Kegiatan	Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	(Rp.)	Dana		Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
					Semua Kelurahan									
	.0 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan (Abdiyasa)		Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Kegiatan		10,000,000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)				15,000,000
2 15 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	,							306,500,000					345,000,000
2 15 01 2.06 0	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Tersedianya komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor		Kab. Madiun, Semua Kecamatan, semua Kelurahan		1 Paket			Pendapatan Asli Daerah (PAD)				25,000,000
2 15 01 2.06 0	12 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Tersedianya peralatan dan Perlengkapan kantor		Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12 Bulan		90,000,000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)				100,000,000,000
2 15 01 2.06 0	14 Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Tersedianya bahan Logistik Kantor		Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Paket		30,000,000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)				33,000,000
2 15 01 2.06 0	95 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Tersedianya barang cetakan dan penggandaan yang terpenuhi		Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12 Bulan		40,000,000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)				50,000,000

Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan Sub Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan

	Ţ.		Indikator Kinerja				Rencana	Tahun 202	22			Pra		laju Rencana n 2023
Kode		Capaian Program	Kelijaran Sijh Kegjatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output	Targ	get Capaian Ki	nerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Cap Kin	rget paian perja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		riogram		Regiataii	Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	(κρ.)	Dalla		Tolok Ukur	Target	(Rp.)
2 15 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan		Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang – undnagan		Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12 Bulan		6,500,000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)				7,000,000
2 15 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Tersedianya rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang dilaksanakan		Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12 Bulan		120,000,000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)				130,000,000
2 15 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				•	•		•	454,400,000		1			467,000,000
2 15 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Tersedianya jasa surat menyurat yang dilaksanakan		Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12 Bulan		6,000,000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)				7,000,000
2 15 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik		Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12 Bulan		78,400,000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)				80,000,000
2 15 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Tersedianya jasa pelayanan umum kantor		Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12 Bulan		370,000,000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)				380,000,000
2 15 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Peme	rintahan	Daerah	•	•				321,600,000		•	•		430,000,000

Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan Sub Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan

	nisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pernubungan		Indikator Kinerja				Rencana	Tahun 202	22			Pral	kiraan Maju Rencana Tahun 2023
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Program	Keluaran Suh Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output	Targ	get Capaian Kir	nerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Cana	aian Kebutuhan
		Program		Regiataii	Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	(κρ.)	Dalla		Tolok . Ukur	Target (Rp.)
2 15 01 2.09 (	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Tersedianya Jasa Pemeliharaan,biaya pemeliharaan,pajak dan perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang dilaksanakan		Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12 Bulan		300,000,000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			400,000,000
2 15 01 2.09 2	1 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Tersedianya Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung Gedung kantor atau Bangunan lainnya		Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12 Bulan		21,600,000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			30,000,000
2 15 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUT	AN JALAN	I (LLAJ)						16,569,140,968				18,440,000,000
2 15 02 2.01	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	1	<u></u>		1	1		1	150,000,000		1		165,000,000
2 15 02 2.01 (	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota		Tersedianya sosialisasi rencana induk jaringan LLAJ Kabupaten/kota		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 PAKET		10,000,000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			15,000,000
2 15 02 2.01 (	Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota		Tersedianya pelaksanaan rencana induk jaringan LLAJ kabupaten/kota		Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Kegiatan		140,000,000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			150,000,000
2 15 02 2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota			•					321,000,000				400,000,000
2 15 02 2.02 (	3 Rehabilitasi dan Pemiliharaan Prasarana jalan		Jumlah operasional palang pintu kereta api perlintasan sebidang yang terbayar, Tersedianya rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana jalan (pemeliharaan palang pintu kereta api perlintasan sebidang)		Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12 Orang 1 Paket		321,000,000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			400,000,000

Unit Organisasi: 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan Sub Unit Organisasi: 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan

Prakiraan Maju Rencana Indikator Kinerja Rencana Tahun 2022 **Tahun 2023** Target Catatan Kebutuhan Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Target Capaian Kinerja Capaian Kode Lokasi Penting Hasil Pagu Indikatif Sumber Dana/ Kinerja Keluaran Sub Kegiatan Output Program Pagu Indikatif Kegiatan (Rp.) Dana Kegiatan Keluaran Sub Tolok Hasil Ukur Target (Rp.) Program Kegiatan Kegiatan 2 15 02 2.03 Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C 100.370.000 135.000.000 Kab. Madiun, Pendapatan Rehabilitasi dan Pemiliharaan Terminal (Fasililitas Utama Tersedianya Rehabilitasi/Pemeliharaan terminal (Fasilitas Semua 2 15 02 2.03 04 1 Kegiatan 100,370,000 Asli Daerah 135,000,000 dan Pendukung) utama atau pendukung) Kecamatan, (PAD) Semua Kelurahan 2 15 02 2.04 Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir 625,000,000 650,000,000 Kab. Tersedianya koordinasi dan sinkronasi pengawasan Madiun, Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin pelaksanaan izin penyelenggaraan dan pembangunan Pendapatan Semua 2 15 02 2.04 02 Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir fasilitas parkir kewenangan kab/kota yang dilaksanakan 100 Orang 625,000,000 Asli Daerah 650,000,000 Kecamatan, Kewenangan Kabupaten/Kota (jumlah satuan Tugas Parkir dan Monitoring yang (PAD) Semua dilaksanakan) Kelurahan 2 15 02 2.05 Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor 530,000,000 625,000,000 Kab. Madiun, Pendapatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Tersedianya sarana prasarana pengujian kendaraan Semua 2 15 02 2.05 01 1 PAKET 200,000,000 Asli Daerah 250,000,000 Kendaraan Bermotor Kecamatan. bermotor (PAD) Semua Kelurahan Kab. Madiun, Pendapatan Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Tersedianya bukti lulus uji pengujian kendaraan Semua 2 15 02 2.05 04 1 PAKET 230,000,000 Asli Daerah 250,000,000 Bermotor bermotor Kecamatan, (PAD) Semua Kelurahan Kab. Madiun, Pendapatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Tersedianya Pemiliharaan sarana dan prasarana Semua 2 15 02 2.05 07 1 PAKET 100,000,000 Asli Daerah 125,000,000 Kendaraan Bermotor pengujian kendaraan bermotor Kecamatan, (PAD) Semua Kelurahan

Unit Organisasi: 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan Sub Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan

				Indikator Kinerja				Rencana	Tahun 20	22			Pral		Maju Rencana ın 2023
ŀ	Code	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output	Targ	get Capaian Kir	nerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Capa	erja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
			riogiaili		Regiataii	Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	(κρ.)	Dalla		Tolok Ukur	Target	(Rp.)
2 15 0	2 2.06	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Ja	ringan Jal	an Kabupaten/Kota						14,652,770,968					16,255,000,000
2 15 0	2 2.06	Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan D2 Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas		Jumlah Pengadaan pemasangan, perbaikan, dan pemeliharaan perlengkapan jalan dalam rangka manajemen rekayasa lalulintas Jumlah tagihan listrik PJU yang terbayar		Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		2 Paket 12 Bulan		14,412,770,968	Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok Penegakan Disiplin				16,000,000,000
2 15 0	2 2.06	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota		Tersedianya pngawasan dan pengendalian efektifitas pelaksanaan kebijakan untuk jalan kabupaten/kota ( PAM lebaran dan tahun baru)		Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Kegiatan		190,000,000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)				200,000,000
2 15 0	2 2.06	05 Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota		Forum lalu lintas dan angkutan jalan kabupaten/kota yang dilaksanakan		Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		4 Kali		50,000,000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)				55,000,000
2 15 0	2 2.07	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) ur	ntuk Jalan	Kabupaten/Kota						40,000,000					50,000,000
2 15 0	2 2.07	01 Penetapan Kebijakan Tata Kelola Andalalin		Jumlah penetapan kebijakan tata Kelola Andalalin yang dilaksanakan		Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		10 Dokumen		40,000,000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)				50,000,000
2 15 0	2 2.09	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang da	an/atau B	arang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota						150,000,000					160,000,000
2 15 0	2 2.09	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Tersedianya angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barangay antar kota dalam satu daerah kab/kota (bus balik gratis)		Kab. Madiun, Semua		5 Bus		150,000,000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)				160,000,000

Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan Sub Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan

Prakiraan Maju Rencana Indikator Kinerja Rencana Tahun 2022 Tahun 2023 Target Catatan Kebutuhan Capaian Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Target Capaian Kinerja Lokasi Hasil Pagu Indikatif Penting Sumber Dana/ Kinerja Keluaran Sub Kegiatan Output Pagu Indikatif Program Kegiatan (Rp.) Dana Tolok Ukur Target Kegiatan Keluaran Sub Hasil (Rp.) Program Kegiatan Kegiatan Kecamatan, Semua Kelurahan TOTAL 23,190,829,900 25,425,890,000